

PERAN PERGURUAN TINGGI AGAMA DALAM MEMBANGUN PERDAMAIAN BERBASIS PANCASILA DI JAKARTA

Ahmad Sofyan¹, Misriandi², Johan Aristya Lesmana³

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, ³Universitas Pertahanan

e-mail: ahmadsofyan@uinjkt.ac.id

Abstract

The role of Islamic Religion College in developing the peace is evidenced by the effort to implement The Five Pilar (Pancasila) Education as the foundation to grow the nationalist and citizenship awareness of Religious people. In the contestation of Jakarta Governor Election, 4 Islamic Religion Colleges contributed in keeping the peace and conduciveness. The role of State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta in the implementation of The Five Pilar (Pancasila) Education as the effort to develop the peace through curriculum approach integrated in lecturing class is always being integrated by the Islamic-Indonesian values as the academic wisdom and the understanding of wasathon (Moderate) Islamic thought in the moderation of religiuos in order to avoid either the extremism understanding or liberalism as the religious wisdom. Regarding to the role of Muhammadiyah University Jakarta, it empashizes the Muhammadiyah social values to be the spirit in conducting the education. This is written in Muhamamdiyah College Duty (Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah), namely: Al-Islam, Muhammadiyah values, education, research and dedication to the society as academic wisdom. Afterwards, the principle of peace and advanced Islam as religious wisdom. Then, Islam University Jakarta plays a role in conducting the peace through academic and non-academic activities integrated by Islamic values in every single of it. The Islamic Studies (dirasah Islamiyah) in Islam University Jakarta is becoming the main subject in all majors for 4 semesters. This is also becoming both the academic wisdom and the religious one performed by the college. The other one is Nahdhotul Ulama University Jakarta, it has the mechanism of conflict resolution as the effort to develop the peace in Jakarta with Islamic-Indonesian values. It aims to develop its students through Pesantren model in order to improve their academic and to apply religious wisdom through Islam Archipelago (Nusantara) as the special characteristic in growing the awareness of nationalism and religiousness. This research employs descriptive qualitative method and in order to provide the balance of the data, the researcher undertakes interview with The Commission of Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) and The commission member II of The Republic Indonesia Parliament (DPR RI). The factors which influence the implementation of The five pilar (Pancasila) education in order to develop the peace after Jakarta governor election, namely: the endurance of citizen, detection and early response system to the conflict in the form of communication among the society, and the empowerment of citizen as the effort to cultivate the citizen's awareness regarding the political issue.

Keywords: *Islamic Religion college, Pancasila (Five pilar) education, developing the peace*

Pendahuluan

Perguruan Tinggi Agama hadir tidak memberikan pendidikan formal pada umumnya. Melainkan sebagai upaya untuk membina sikap keagamaan yang benar dan baik yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang menghadirkan isu-isu agama, tentu Perguruan Tinggi Agama memainkan peran serius dalam menjaga sivitas akademiknya untuk tidak larut dalam kontestasi politik praktis yang menggaungkan nama agama sebagai tameng untuk perebutan kekuasaan ataupun jiwa nasionalisme yang dijadikan senjata untuk menuduh di luar kelompoknya itu radikal dan intoleran.

Perseteruan antara kubu politik yang mengatasnamakan agama dan mengatasnamakan nasionalis inilah yang mewarnai konflik sosial selama penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta berlangsung. Peran Perguruan Tinggi Agama dalam membangun perdamaian yang berbasis Pancasila adalah salah satu strategi untuk resolusi konflik di Jakarta. Isu-isu yang berkembang di masyarakat sudah mengkhawatirkan dengan adanya aksi-aksi demonstrasi, aksi diskriminasi, dan aksi saling menuduh. Hal ini yang dapat diuraikan melalui kearifan akademi dan kearifan agama.

Pilkada serentak yang diselenggarakan oleh KPU adalah terobosan baru dalam demokrasi Indonesia. Khususnya pada Pemilu tahun 2017, peserta pemilu diikuti oleh 101 daerah yang terdiri atas 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten, (www.kpu.go.id). Dari kesemua penyelenggaraan pemilu, DKI Jakarta yang paling menyedot perhatian rakyat secara nasional. Polemik bermunculan di kalangan masyarakat sepanjang perjalanan Pemilu DKI Jakarta 2017 berlangsung. Terutama ujaran-ujaran kebencian yang meramaikan media sosial. Beberapa berita atau informasi bohong (*hoax*) tersebar dengan sangat cepat sehingga mengaibatkan kekaduan sosial di tengah masyarakat. *Black capign* dilakukan oleh masing-masing pendukung pasangan calon. Hal ini tentu menjadi renungan bersama bahwa dalam kontestasi politik, masyarakat kita masih rentan dengan provokasi yang tidak bertanggung jawab.

Peran Perguruan Tinggi Agama di Jakarta sangat penting untuk menjaga perdamaian. Pengamat dan praktisi dari Perguruan Tinggi diharapkan memberikan solusi bagi pembangunan perdamaian di DKI Jakarta pascapemilu. Selain itu, peran mahasiswa dari perguruan tinggi agama tersebut diharapkan bisa memberikan sosialisasi untuk meredam konflik dalam upaya menjaga kondusivitas masyarakat Jakarta. Implementasi pendidikan Pancasila sebagai lemen kebangsaan penting dalam menjaga perdamaian melalui nilai-nilai toleransi, kemajemukan, dan persatuan perlu ditingkatkan dan terus dituntaskan sebagai suatu upaya memberikan pemahaman pada masyarakat untuk tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Agama dibutuhkan untuk bisa meredam aksi kecewa dan kebencian yang pada akhirnya hanya akan merugikan agama itu sendiri. Pembangunan perdamaian melalui agama atau *religious peacebuilding* adalah sebuah istilah untuk menggambarkan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para agamawan secara personal maupun institusional dalam hal ini perguruan tinggi agama yang bertujuan untuk menghentikan dan mentransformasikan konflik guna membangun hubungan sosial, institusi politik yang dilandasi oleh etos toleran dan tanpa kekerasan (Appleby dan Little dalam Coward dan Smith, 2004). Istilah pembangunan perdamaian dipopulerkan oleh John Galtung dalam bukunya *the approach to peace*. Bahwa pembangunan perdamaian adalah sebuah proses yang komprehensif yang melingkupi segala aspek dan pendekatan yang

diperlukan untuk mentransformasikan konflik menuju tatanan sosial-politik, sosial-ekonomi, dan hukum yang lebih adil demi perdamaian yang berkelanjutan, (1960 : 303).

Pendidikan Pancasila sebagai suatu kurikulum di perguruan tinggi harus direaktualisasi demi mentransformasikan kondisi sosial masyarakat yang terpecah menjadi suatu tatanan nilai yang toleransi, berkeadilan, persatuan dan permusyawaratan. Menurut Ubaedillah, perlu adanya rejuvenasi Pancasila yang dilakukan dengan cara mengukuhkan kembali posisinya sebagai dasar negara , mengembangkannya ke dalam wacana ilmiah, mengupayakan konsistensinya dengan produk perundangan, berkoherensi antara sila dan berkorespondensi dengan realitas sosial, menjadannya sebagai karya, kebanggaan, dan komitmen bersama, (2015:33). Para agamawan, bangsawan, akademisi, pengamat, dan praktisi dalam Perguruan Tinggi Agama di Jakarta ketika bersatu dalam membangun perdamaian melalui agama dan Pancasila akan menjadi langkah besar dalam upaya menciptakan kehidupan harmonis setelah keringnya nalar pada pemilukada DKI Jakarta 2017.

Fenomena yang digambarkan adalah intensitas ketegangan masyarakat yang terbelah akibat kontestasi pemilukada DKI Jakarta semakin tidak terkendali, khususnya di media sosial. Masyarakat yang terbagi dalam dua kubu terpecah akibat kontestasi politik dan masalah hukum belum terselesaikan hingga kini. Lemahnya pengawasan pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, akademisi, pengamat, dan praktisi dalam membangun perdamaian di DKI Jakarta. Kelompok masyarakat yang mengidentitaskan dirinya sebagai kelompok agama dengan kelompok nasionalis harus dicarikan titik temu dan solusinya. Lemahnya pendalaman internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadikan mudahnya akses untuk bersikap permusuhan dan konflik kebencian semakin berlarut-larut penyelesaiannya. Maka dapat dari permasalahan tersebut diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana peran Perguruan Tinggi Agama di Jakarta dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila sebagai upaya membangun perdamaian masyarakat pascapemilukada DKI Jakarta 2017? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Perguruan Tinggi Agama dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila sebagai upaya membangun perdamaian masyarakat pascapemilu DKI Jakarta 2017?

Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori dan konsep yang relevan sebagai pisau analisis dan pengembangan kajian keilmuan. Teori yang digunakan misalnya; *Pertama*, Teori Peran. Teori peran (*role theory*) mendefinisikan “peran” atau “*role*” sebagai “*the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries*” (Banton, 1965; Katz &Kahn, 1966, dalam Bauer, 2003: 54). Selain itu, Robbins (2001: 227) mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*” Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi

peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58).

Kedua, Teori Implementasi. Pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2008: 187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui; implementasi strategi, pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan, dan pengendalian.

Teori implementasi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi pendidikan Pancasila sebagai upaya membangun perdamaian di Jakarta. Kebijakan perguruan tinggi agama di Jakarta dalam menerapkan kurikulum yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa sebagai elemen yang menjalankan kebijakan perlu mendapatkan dukungan dari para dosen yang dalam program kebijakan masuk dalam intervensi. Kegiatan intervensi juga melibatkan unsur masyarakat Jakarta. Perguruan tinggi sebagai fokus penelitian tentu memiliki mekanisme lain selain kurikulum di kampus dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila dalam kehidupan akademik dan lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang akan diteliti untk mengetahui sejauhmana kontribusi perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila sebagai upaya membangun perdamaian pascipilkada DKI Jakarta 2017.

Ketiga, Konsep Ketahanan Masyarakat (*community resilience*). Ketahanan (*Resilience*) merupakan suatu konsep pencegahan konflik dengan penekanan pada sistem sosial yang melakukan respon terhadap krisis di masa depan termasuk didalamnya protokol perencanaan dan sistem peringatan dini (Ami, 2014). Secara garis besar, untuk menghindari terjadinya konflik dalam skala yang lebih besar maka diperlukan adanya usaha untuk memperkecil isu-isu mendasar melalui penguatan ketahanan suatu masyarakat. Potensi terbesar dalam pencegahan konflik terletak didalam pemeliharaan kekuatan dan ketahanan dari jaringan sosial-politik lokal beserta institusi lokal yang mampu memberikan respon konstruktif dari suatu tensi konflik dan faktor stress (Ami, 2014). Benang merah didalam konsep *Resilience* terletak pada pentingnya peningkatan kekuatan aktor-aktor serta institusi lokal untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Ketahanan masyarakat (*community resilience*) akan semakin kuat apabila terdapat *regime resilience* sebagai komponen penting didalam sistem sosial. *Regime Resilience* mencakup 3 model kapasitas dasar yang harus dipenuhi yaitu *Buffer Capacity*, *Adaptive Resilience*, dan *Transformational Capacity* (Ami, 2014). *Buffer capacity* menekankan pada kemampuan suatu sistem untuk menyerap guncangan yang ada didalam suatu pemerintahan, termasuk didalamnya elemen-elemen pemerintahan yang sudah ada untuk mengatasi guncangan tersebut. Sebagai contohnya, kemampuan pemerintah dalam menerima pengungsi atau kemampuan untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan tidak menyebabkan masyarakat kedalam perang saudara. *Adaptive capacity* menyangkut persoalan terkait kemampuan suatu sistem dalam menyerap guncangan dan melakukan pengaturan kembali didalam perubahan yang

terjadi. *Transformational capacity* berhubungan dengan kemampuan melakukan perubahan didalam struktur aktualnya agar tetap dapat berfungsi secara maksimal. Ketika gangguan muncul dan sistem yang ada tidak dapat dipertahankan maka sistem tersebut harus mampu berubah serta menyesuaikan.

Para Peneliti di *Darhmouth Medical School* di Hampshire mengklasifikasikan *resilience* ke dalam 4 (empat) kluster yaitu *Social Capital*, *Economic development*, *Information and Communication*, dan *Community competence* (dalam Ami, 2014). Selain dari kluster tersebut, *resilience* juga menyangkut *robustness of resources* yang dimilikinya. *Robustness of resources* merupakan suatu perhitungan yang mencakup *Performance*, *Diversity*, dan *Redundancy of Community Availability Resources* (Ami, 2014). *Performance* merupakan suatu bentuk kapasitas dan kualitas dari fungsi yang dijalankan didalam masyarakat. *Diversity* berhubungan dengan ketersediaan berbagai macam sumber daya yang menjalankan fungsi yang sama, sebagai contoh berbagai macam spesies dan populasi membantu untuk memelihara fungsi kesehatan lingkungan. *Redundancy* berhubungan dengan sumberdaya yang bersifat sebagai substitusi (sumber daya pengganti) atau kepemilikan atas berbagai cara dan sarana untuk memenuhi kebutuhan serta mengatasi isu tertentu.

Keempat, Konsep Membangun Perdamaian (*peace building*). Dalam konteks teori sumber konflik, Dahrendorf (dalam Safithri;676) mengatakan bahwa setiap warga masyarakat atau manusia memiliki sisi ganda yaitu selain memiliki potensi damai juga memiliki potensi konflik yang sulit dipisahkan antara satu dengan lainnya, seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Dengan demikian kata Dahrendorf, kekayaan, status ekonomi dan status sosial dapat mempengaruhi intensitas konflik dalam masyarakat.

Membangun perdamaian merupakan pendekatan jangka panjang untuk melihat cara-cara yang dapat membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengamankan perdamaian hingga masa depan. Membangun perdamaian diarahkan dengan membantu pihak-pihak yang bertikai untuk menemukan penyelesaian masalah-masalah sosial, ekonomi dan psikologi yang cenderung dapat memunculkan konflik pada masa yang akan datang. Membangun perdamaian secara khusus peduli pada peningkatan kualitas hidup untuk orang-orang ditingkat paling bawah dalam masyarakat dan memiliki maksud pemulihan jangka panjang disamping tujuan pencegahan. Mediasi merupakan campur tangan dalam sebuah perselisihan atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak memihak dan netral, tidak memiliki wewenang kekuasaan dalam pengambilan keputusan, secara sukarela membantu pihak-pihak yang bertikai dalam meraih penyelesaian bersama yang diterima oleh mereka sendiri terhadap permasalahan-permasalahan dalam perselisihan tersebut.

Kelima, Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan terpadu yang merangkum nilai-nilai sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, serta personal/spiritual. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers dalam Kartasmita, 1997). Pengertian pemberdayaan mengacu pada kata *empowerment*, yaitu upaya aktualisasi potensi yang sudah dimiliki. Penekanannya lebih kepada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem dalam mengorganisir diri mereka sendiri, dengan pendekatan peran individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku dalam menentukan tindakan yang sesuai bagi mereka.

Tujuan dari pemberdayaan adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, berpikiran jauh kedepan, mampu merencanakan dan melaksanakan perubahan secara sistematis, dan menerima hasil-hasil perubahan yang direncanakan secara rasional. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Kartasasmita (1997), masyarakat diharapkan mampu untuk mengembangkan aset/sumberdaya (*capital*) yang ada pada mereka berupa; *human capital*, *social capital*, *infrastructure capital*, *financial capital*, dan *environment capital*.

Keenam, Teori Identitas Sosial (*social identity theory*). Identitas sosial sebagai teori tidak bisa lepas dari keinginan individu untuk memperbandingkan dirinya serta kelompoknya dengan yanglain. Perbandingan sosial digambarkan oleh Festinger (1954) sebagai teori dimana bisa membimbing kita untuk membandingkandiri kita dengan yanglain, siapa yang serupa dengan kita dan siapa yang berbeda, siapa yang berada di atas dan siapa yang berada di bawah. Setidaknya ada tiga variabel yang mempengaruhi hubungan pembedaan antar kelompok dalam situasi sosial yang nyata (*Tajfel, 1974; Turner, 1975; dalam Hogg & Abrams, 2000*). *Pertama*, individu pasti memiliki internalisasi kelompok mereka sebagai konsep diri mereka: secara subjektif mereka pasti mengidentifikasi kelompok yang relevan. Hal ini tidak cukup darioranglain saja yang mengidentifikasi seseorang kalau dari kelompok manadia berasal. *Kedua*, situasi sosial akan menciptakan perbandingan sosialyang memungkinkan terjadinya seleksi dan evaluasi atribut relasi yang relevan. Perbedaan kelompok pada tiap-tiap daerah tidak sama secara sikinifikan. Misalnya saja, di Amerika perbedaan kelompok lebih cenderung menonjol pada perbedaan warna kulit, tapi perbedaan warna kulit bukan sesuatu yang menonjol di Hongkong. *Ketiga*, *in-group* tidak membandingkan dirinya pada tiap proses kognitif yangada pada *out-group:out-group* pastinya dipersepsikan sebagai kelompok perbandingan yang relevan baik dalam kesamaan, kedekatan, dan secara situasional menonjol. Kemudian, Determinasi *out-group* dihasilkan sebagai perbandingan terhadap determinasi *in-group*.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan untuk mencari model komprehensif mengenai pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian di masyarakat. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Jane Richie dalam Moleong (2007: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Menurut Moleong sendiri (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya; perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara komprehensif dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam melakukan penelitian, ada instruen metode yang harus dijalankan diantaranya, *Pertama*, Sumber data. Sumber data memiliki dua macam, yaitu sumber data utama dan sumber data tambahan. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157) menyebut sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Sedangkan sumber data kedua adalah sumber data yang didapat dari luar tindakan dan kata-kata, yaitu berupa data tambahan yang berasal dari sumber buku,

majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi, dalam hal ini termasuk jurnal, sumber internet yang bisa dipercaya, dan lain-lain (2007:159).

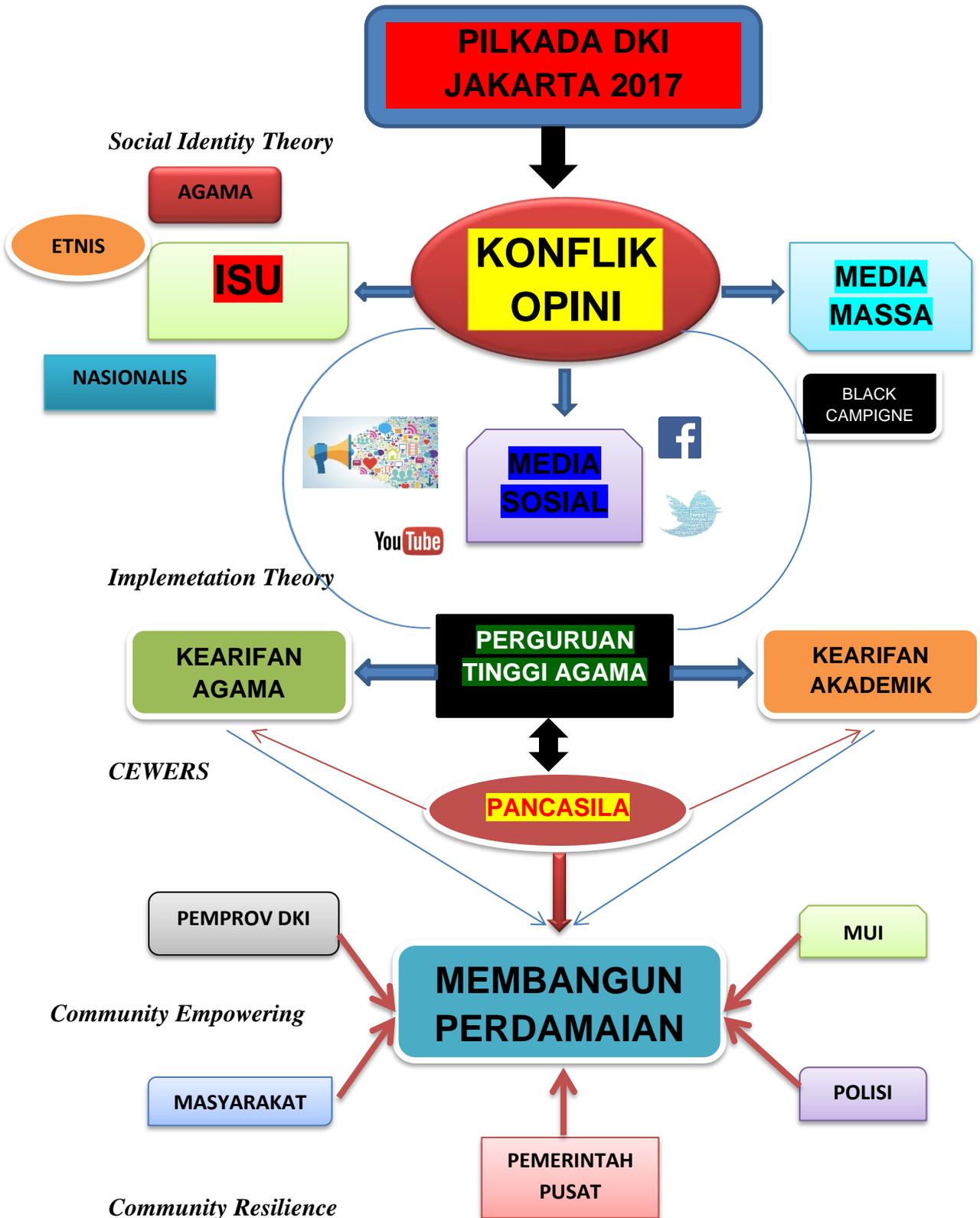
Sumber data primer akan diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber. Sedangkan sumber data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen resmi dari instansi dan beberapa dokumen lain. Juga menggunakan informasi media massa sebagai informasi tambahan. Narasumber yang akan diwawancarai dari 4 Perguruan Tinggi Agama yang disebutkan dan beberapa lembaga pemerintahan dan aparat keamanan.

Kedua, Subyek Penelitian. Subyek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan, (Amirin, 1986). Subyek penelitian atau narasumber penelitian yang terkait langsung dengan pertanyaan penelitian. Narasumber penelitian yang akan diwawancarai adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rektor UMJ, Rektor UIJ, dan Direktur STAINU. Adapaun untuk melengkapi data penelitian dilakukan wawancara pada Majelis Ulama Indonesia, dan DPR RI Komisi II.

Ketiga, Teknik Pengumpulan Data. Menurut Noor (2012: 138) teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Secara umum teknik pengumpulan data dapat menggunakan wawancara, pengamatan, studi dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Observasi dilakukan untuk mengamati medan penelitian dan perilaku sosial masyarakat Jakarta pascapemilukada 2017. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan maupun tidak langsung dengan mengamati pemberitaan di media massa. Adapaun untuk wawancara dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data-data empirik dari para narasumber atau pelaku yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini. adapun studi dokumentasi dikumpulkan untuk melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat. Serta tindakan dan langkah apa saja yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi agama di Jakarta maupun pihak-pihak terkait dalam upaya membangun perdamaian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan sampel dari seluruh stakeholders yang berkaitan dengan pembangunan perdamaian di masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan dengan 3 teknik, yaitu wawancara, observasi, dan pelacakan dokumen terkait.

Keempat, Teknik Analisis Data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sutopo (2010), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan cara memilah informasi penting dari narasumber yang berhubungan langsung dengan pendidikan Pancasila dan peran perguruan tinggi agama dalam upaya membangun perdamaian. Setelah data hasil wawancara direduksi, maka data disajikan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan pisau analisis dari tiga teori yang akan digunakan. Setelah dianalisis secara mendalam dengan teori-teori yang relevan, maka tahap selanjutnya disimpulkan menjadi suatu gambaran lengkap dan komprehensif mengenai pembangunan perdamaian pascapemilukada DKI Jakarta 2017.

Kerangka Pemikiran





Sumber: Sugiyono (2012: 92)

Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

Penelitian akan berfokus pada pembangunan perdamaian yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila yang berbasis di Perguruan Tinggi Agama di Jakarta. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan data-data yang otentik dan tervalidasi untuk kepentingan pembangunan perdamaian di DKI Jakarta. Alur penelitian akan dimulain dengan mewawancarai narasumber di 4 PT Agama serta melakukan observasi mengenai pendidikan Pancasila di kampus tersebut. Kemudian setelah melakukan wawancara atau pengambilan data di lapangan, selanjutnya adalah mereduksi data yang sebelumnya data hasil wawancara ditranskrip untuk memudahkan dalam proses reduksi data. Data yang direduksi sebisa mungkin adalah data-data primer dan sekunder yang valid untuk disajikan. Data-data hasil wawancara, observasi, dan pelacakan dokumen tersebut disajikan secara ringkas dan padat dengan tidak menghilangkan data penting yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian data disajikan dengan analisis teori dan konsep yang telah disiapkan. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada variabel penelitian dan pertanyaan penelitian. Data dianalisis menggunakan teori pembangunan perdamaian, teori identitas sosial. Dan teori implementasi. Kemudian konsep yang digunakan adalah ketahanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan sistem peringatan dan deteksi dini. Kemudian dilakuka penarikan kesimpulan dari semua data yang telah dianalisis. Selain kesmpulan, juga rekomendasi terkait pembangunan perdamaian yang semestinya dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Perguruan Tinggi Agama (PT Agama) menjadi titik sentral dalam membangun peradaban bangsa yang bermartabat dan berkeadilan dalam upaya membina perdamaian masyarakatnya. Perguruan tinggi agama tidak hanya sekedar mimbar akademik, tetapi juga sebagai kawah candradimuka dimana karakter, akhlak atau akal budi dijunjung tinggi. PT Agama hadir mempertegas nilai persatuan anatara nasionalisme dan religiusitas, dua entitas yang menjadi pilar kepribadian bangsa yang luhur. Narasi akdemik yang dibangun dengan kokoh di lingkungan kampus sejatinya perlu ditransformasikan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kampus harus bermitra bersama masyarakat dalam menentukan arah masa depan bangsa. Tidak hanya itu, kampus juga diharapkan dapat menjadi kekuatan tambahan bagi msayarakat untuk menyelesaikan problematika yang mendera. Nalar akademik yang didaulat oleh keilmuan yang kokoh dan budi yang luhur (*akhlaq al-karim*) menjadikan kampus

sebagai wadah terbinanya insan cita terhadap kemajuan dan kesejahteraan suatu negara yang berkeadilan.

Pendidikan Pancasila yang menjadi Mata Kuliah Umum (MKU) wajib di semua Perguruan Tinggi adalah bukti bahwa kampus menjadi wadah pembinaan nasionalisme. Pendidikan Pancasila diimplementasikan untuk dapat memagari mahasiswa dari berbagai ancaman multidimensional yang menggerus rasa nasionalisme. Saat ini aktivitas radikalisme sudah mulai bersarang di kampus-kampus dengan karakter dan doktrin anti-negara dan anti terhadap sistem negara Indonesia. Hal ini kemudian perlu menjadi perhatian bersama agar tujuan pendidikan nasional tetap terpatri dalam jiwa setiap warganya. Pendidikan Pancasila di PT tentu diharapkan memberikan efek yang jelas bagi terselenggaranya pendidikan yang menanamkan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme.

Perguruan Tinggi Agama sebagai bagian terintegrasi juga menjadi wadah ditanamkan dan ditumbuhkannya jiwa nasionalisme melalui Pendidikan Pancasila. Sebagai MKU Wajib yang harus diajarkan, Pendidikan Pancasila adalah penegas bahwa nasionalisme harus dibangkitkan dan ditumbuhkan oleh umat beragama di Indonesia. meminjam salah satu pepatah Arab "*Hubbul wathan minal iman*" atau yang artinya mencintai negara (tanah air) adalah bagian dari iman. Pepatah ini tidak hadir begitu saja, akan tetapi diracik dari berbagai hadits yang mengisahkan perjalanan nabi, Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah suatu ketika melakukan perjalanan ke luar kota dan selalu mengingat Madinal al-Munawarah, kecintaan Rasulullah terhadap Kota tempat tinggalnya itu yang kemudian banyak para perawi hadits atau penafsir dari kalangan *alim ulama, umaro atau amiril mukminiin* membuat satu pepatah "cinta tanah air adalah bagian dari iman." Dalam kacamata Islam, tidak ada ketentuan baku yang mengatur sistem negara. Islam menganjurkan agar setiap manusia bisa patuh terhadap pemimpinnya sebagai perwakilan Rasulullah di dunia. Begitu juga aturan untuk memilih pemimpin dalam suatu daerah atau negara.

Proses Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menyita banyak perhatian masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri adalah fenomena yang harus disikapi dengan bijak. Terjadi konflik opini di tengah masyarakat adalah hal biasa. Namun ketika hal itu berkecamuk di media sosial, media massa, dan di dunia nyata, maka perlu ada tindakan tegas dari pemerintah, terutama terhadap pelaku ujaran kebencian. Merebaknya isu-isu menyesatkan adalah bagian dari degradasi literasi yang mengkhawatirkan di Indonesia. Maka peran PT dalam membenahi degradasi literasi tersebut. Menurut TB Ace Hasan Syadzily, ada 3 instrumen dalam rangka membangun perdamaian, yaitu meningkatkan literasi, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan pemahaman keislaman. Ketiga instrumen tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat (TB Ace Hasan, wawancara 11 September 2017). Maka peran perguruan tinggi agama dalam membangun perdamaian dimulai dari literasi.

Peran Perguruan Tinggi Agama

Peran perguruan tinggi agama dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai Mata Kuliah Umum (MKU) wajib di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila diajarkan untuk membina mahasiswa agar dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perguruan tinggi yang masuk dalam penelitian memiliki peran yang berbeda. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui kearifan akademiknya mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu Pancasila dan Kewiraan menjadi

kearifan akademik Keislaman-keindonesiaan. Di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) melalui 2 fundamental menanamkan pendidikan Pancasila melalui doktrin bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang sudah final, sebagai *way of life*, dan Indonesia adalah negara kesepakatan. Kemudian fundamen yang kedua adalah Kemuhammadiyah sebagai ideologi masyarakat. Hal itu menjadi rumusan dalam 4 darma UMJ yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Kemudian Universitas NU Indonesia (UNUSIA/STAINU) menempatkan Pendidikan Pancasila untuk membangun *akhlaqul karimah* dan Pancasila sebagai ijtihad para ulama yang harus menjadi spirit jihad bagi generasi penerus untuk mempertahankan NKRI. Adapun Universitas Islam Jakarta (UIJ) memiliki kearifan akademik dalam implementasi Pendidikan Pancasila sebagai integrasi dari semua mata kuliah yang diajarkan, UIJ memiliki mekanisme integrasi, yaitu setiap rumpun ilmu itu harus sesuai dengan pancasila dan nilai-nilai Islam. di kampus UIJ mahasiswa dikenalkan mata kuliah *dirasat islamiyah* selama 4 semester untuk menanamkan jiwa keislaman yang berkarakter Pancasila.

Kemudian selain kearifan akademik, dalam penelitian ini jugamengangkat kearifan agama sebagai upaya untuk membangun perdamaian di Jakarta. Kearifan agama yang ditemukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Islam *Wasathiyah* atau Islam Arus Tengah. UIN Jakarta menekankan bahwa sebagai muslim arus tengah tidak terjerumus pada liberalisme dan ekstremisme. Posisi UIN Jakarta ada pada kemoderatan dalam memahami dan mengejawantahan nilai-nilai Islam. Islam moderat yang diusung melalui pemahaman *wasathan* inilah yang kemudian menempatkan UIN Jakarta sebagai kampus Profesional Islami. Adapun di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) berpegang teguh pada Islam yang Berkemajuan sesuai visi dari ormas Muhammadiyah. Spirit Islam Berkemajuan adalah untuk mengembangkan potensi muslim dalam bidang keilmuan untuk mencapai kesejahteraan melalui kemajuan ekonomi, teknoogi, pendidikan, dan sebagainya. Di Universitas NU Indonesia (UNUSIA/STAINU) berpegangan pada nilai Islam Nusantara sebagai resolusi konflik. Islam yang mengakomodasi nilai-nilai budaya di Indonesia cukup berhasil menjaga erdamaian di Indonesia. Hal ini terbukti Islam Nusantara dijadikan landasan bagi negara-negara konflik di Timur Tengah untuk mengadakan rekonsiliasi. Di Universtas Islam Jakarta (UIJ) secara spesifik tidak ada kearifan agama, akan tetapi dengan adanya pendidikan *dirasat islamiyah*. UIJ berusaha membangun nilai-nilai Islam untuk membangun perdamaian. secara spesifik, peran masing-masing kampus dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Jakarta sebagai tempat membina karakter kepribadian Islami yang moderat untuk fokus pada persoalan sosial dengan mengedepankan toleransi, inklusif, dan pluralis. Pada kontestasi politik di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang ramai dengan aksi berjilid, Dede Rosyada selaku Rektor tidak mengeluarkan izin bagi mahasiswanya secara kelembagaan untuk bergabung dalam aksi serial pembelaan tersebut. Secara kritis Dede Rosyada menegaskan bahwa “Mahasiswa UIN Jakarta harus kritis terhadap berbagai fenomena sosial, pada aksi berjilid tersebut agama mana yang dirugikan, atau jangan karena salah satu tokoh agama yang tersinggung kemudian jadi aksi nasional bela agama,” (Dede Rosyada, wawancara 19 Oktober 2017). Hal inilah yang perlu dicermati bersama, bahwa jangan sampai ketersinggungan salah satu tokoh agama dijadikan landasan kemarahan muslim atas dasar agama.

UIN Jakarta menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui program *community outreach* yang dilakukan konsisten melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Desa Mitra yang dilakukn oleh Pusat Pengabdian pada Masyarakat. Program ini adalah bagian dari peran akademik yang ditransformasikan menjadi suatu tindakan nyata. Menurut Dede Rosyada, “UIN Memiliki peran akademik yang dijadikan menjadi *behaviour*. Melalui pendekatan akademik diharapkan mempengaruhi *behaviour*, cara pikir, dan cara pandang. Kampus berperan positif dalam menjaga perdamaian dengan nilai-nilai inklusif dan toleransi” (Dede Rosyada, wawancara 17 Oktober 2017).

Program yang dilakukan oleh UIN Jakarta untuk mengimplementasikan nilai-nilai pancasila melalui seminar, workshop, dan KKN. Pihak kampus akan memberkan petunjuk bagi ara mahasiswa yang akan menyelenggarakan kegiatan seminar agar sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Jika tidak sesuai biasanya tidak diizinkan oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama di fakultas masing-masing. Visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menjadikan civitas akademiknya sebagai “Profesional Islami” terus dikembangkan. Salah satunya melalui metode integrasi Islam dan sains. Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah kini lebih aplikatif dan diharapkan bisa menjawab tantangan zaman yang semakin berubah. Oleh karena itu, UIN Syarif Hidayatullah terus berupaya menyesuaikan visi dengan tujuan pendidikan nasional yang selama ini sebagai garis besar keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Semua unsur pimpinan di UIN Syarif Hidayatullah terus melakukan peningkatan kinerja akademik dan profesionalisme untuk mewujudkan kampus berkelas internasional.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengembangkan istilah Islam *Wasathan* atau Islam Arus Tengah. *Image* UIN Syarif Hidayatullah itu moderat dan *wasathon* atau arus tengah dalam menyikapi persoalan pemikiran Islam. pada konsep Islam moderat dan arus tengah yang dikembangkan adalah Islam berupaya menyeleksi warisan masa lalu yang relevan, sambil menciptakan hal baru sesuai dengan tuntutan zaman (Abuddin Nata, 2004:32, vol.2). Islam *Wasathiyah/wasathan* tidak cenderung pada pemikiran liberal maupun pada ekstremis.

Corak tengah yang diusung untuk tidak terjebak pada arus berlebihan yang sering dilakukn oleh aliran liberal maupun ekstremis. Bahkan karena mengambil posisi di tengah inilah Islam Wasathiyah ini menjadi resolusi konflik di masyarakat, terutama pada kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta 2017. Pemahaman *wasathan* memungkinkan untuk tidak terjerumus pada konflik identitas SARA yang terjadi di pilkada DKI Jakarta. Artinya posisi *wasathan* ini terhindar dari pengakuan merasa paling agamis, maupun merasa paling nasionalis. Karena perlu ditegaskan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersepakat untuk mengusung Keislaman-Keindonesiaan sekaligus sebagai suatu nilai yang paripurna yang dapat diimplementasikan di Indonesia yang mayoritas beragama muslim ini.

Kedua, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Universitas Muhammadiyah Jakarta atau biasa disingkat UMJ merupakan kampus di bawah naungan Kementerian Ristek Dikti Republik Indonesia. tentu kiblat visi misinya pada salah satu ormas terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Peran UMJ dalam membangun perdamaian pascapilkada DKI Jakarta sikap bijaknya untuk tidak terjerumus pada konflik tersebut. UMJ mengambil garis di atas konflik yang berperan untuk membina mahasiswa agar tidak terlibat secara langsung dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, UMJ memandang bahwa kisruh politik itu bisa diselesaikan ke ranah hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK itulah yang kemudian harus ditaati oleh semua pihak. Jika tidak diajukan ke MK berarti semua pihak merasa bahwa pilkada

telah selesai. Menurut Syaiful Bakhri, “Pemilu selalu menimbulkan akibat. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia setiap kecurangan dibawa ke MK. Tapi kalau ada indikasi kecurangan tidak dibawa ke MK, maka dianggap sudah selesai.”

Kurikulum yang diterapkan oleh UMJ melihat atas dasar Pembukaan UUD 1945. Di UMJ, mata kuliah umum diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam agar senantiasa lulusan UMJ menjadi imam di setiap kesempatan. UMJ menegaskan bahwa Pancasila adalah pandangan dasar negara sudah final yang perlu dikukuhkan dalam bermasyarakat dan bernegara. Implementasi mata kuliah Pancasila memandu sampai kepada Rencana Pembelajaran Semester (RPS). UMJ mengembangkan kurikulum sesuai darma al-Islam dan kemuhammadiyah. Pada Peraturan Rektor UMJ Nomor 520 mengatur tentang penambahan Al-Islam dan Kemuhammadiyah menjadi darma pertama pendidikan di seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Hal tersebut untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap ilmu pengetahuan. Nilai-nilai kemuhammadiyah harus menjadi sikap hidup warga muhammadiyah dalam membangun ketahanan masyarakat secara umum. Menurut Kahar Maranjaya selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, menyebutkan bahwa, “Dalam mata kuliah agama dan lainnya seluruhnya dikaitkan dengan al-Islam. sebelum mahasiswa lulus diwajibkan menghafal ayat-ayat pendek sekurang-kurangnya juz 30. Diharapkan kelak ketika terjun ke masyarakat sudah punya modal melalui proses pembelajaran dengan basis Islam. Jadi apapun profesi lulusan UMJ di masyarakat tetap akan bisa menjadi imam shalat misalnya.”

UMJ mengedepankan prinsip *al-Islam* dan Kemuhammadiyah sebagai perangkat untuk bermasyarakat. Semangat itulah yang dibawa sebagai pandangan warga UMJ untuk menjalankan kehidupan sosial. UMJ menyatukan kearifan akademik dengan kearifan agama yang diusung oleh induknya Muhammadiyah yaitu Islam yang berkemajuan. Oleh karena itu, Syaiful Bakhri menyebutkan “ada 4 darma perguruan tinggi Muhammadiyah yang harus dijadikan *spirit*, yaitu al-Islam dan Kemuhammadiyah, Pengajaran/Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Keempat darma ini menyatu menjadi kearifan akademik sekaligus kearifan agama yang memiliki visi Islam yang berkemajuan.” (Syaiful Bakhri, wawancara 23 September 2017).

Ketiga, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia (UNUSIA/STAINU Jakarta). UNUSIA adalah nama universal dari kampus yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama atau disingkat STAINU. Rumpun keilmuan yang lebih universal menjadikan perubahan nama pada kampus tersebut. Modal sosial yang dimiliki oleh UNUSIA tentu sudah tidak asing lagi, yaitu ormas terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU). Selama ini NU dikenal sebagai organisasi yang sibuk mengurus konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Cara pandang NU mengenai Islam dinilai berhasil memberikan perdamaian di Indonesia. oleh karenanya, banyak negara di Timur Tengah yang sedang berkonflik meminta ulama NU untuk menjadi mediator untuk resolusi konflik. Negara-negara tersebut diantaranya, Afghanistan, Yordania, Yaman, Mesir, Tunisia, Lebanon, dan lainnya. Dengan sederet prestasi tersebut, NU menjadi ormas yang berkembang mengikuti perkembangan zaman dan terus memberikan arti bagi perdamaian dunia. UNUSIA secara kelembagaan di Perguruan Tinggi yang bernaung pada PBNU tentu dibina untuk mengamalkan peran besar dari NU. Mengusung Islam Nusantara sebagai gerakan moral untuk membangun ummat agar senantiasa memadukan budaya nusantara dalam setiap doktrin keagamaan menjadikan NU lebih mudah diterima di

masyarakat. Marsudi Syuhud memangdang bahwa, “Islam Nusantara adalah untuk membangun perdamaian. Indonesia adalah negara beragama sesuai Pancasila.” (Marsudi Syuhud, wawancara 22 September 2017).

Kearifan agama yang menjadi suatu gerakan internasional dari ormas NU, yaitu Islam Nusantara adalah corak tegas UNUSIA dalam melakukan pembinaan pada mahasiswa. Tujuannya jelas untuk perdamaian di dunia. Pada konteks Pilkada DKI Jakarta 2017, peran kearifan agama UNUSIA ini untuk meredam konflik yang diakibatkan beberapa kelompok untuk menguatkan identitas keislaman yang berwajah marah dan gemar menuduh munafik dan kafir pada kelompok di luar kelompoknya. Sikap menuduh kelompok lain sesat atau kafir (*takfiri*) adalah sebab konflik itu terjadi dan kontestasi pilkada menjadi bersuhu panas. Siapa saja dituduh munafik jika muslim memilih Ahok. Hal inilah yang kemudian diluruskan oleh kearifan agama yang dibawa oleh UNUSIA.

Islam Nusantara adalah penamaan untuk memudahkan mengidentifikasi bahwa umat Islam di Indonesia memiliki corak yang khas yang mengadopsi budaya nusantara sebagai kekuatan membangun umat yang penuh kedamaian, toleran, pluralis, dan inklusif. Budaya masyarakat nusantara sebagai kekuatan untuk mempersatukan umat diadopsi dan dimodifikasi menjadi suatu khazanah kebudayaan Islam khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara basis Islam lainnya seperti di Timur Tengah yang porak-poranda dilanda konflik tidak berkesudahan. NU menganggap kehadiran Islam tidak lantas membunuh budaya masyarakat yang telah dibangun sejak lama. Akan tetapi budaya itu diadopsi sebagai suatu tradisi untuk pengembangan nilai-nilai Islam yang humanis dan mudah diterima oleh masyarakat luas. Karena Indonesia memiliki tradisi yang kuat. Berbeda dengan di negara lain.

Keempat, Universitas Islam Jakarta (UIJ). Peran UIJ sebagai kampus berbasis Islam di Jakarta cukup penting, mengingat terletak di tengah Ibukota. UIJ memandang kontestasi politik DKI Jakarta cukup menguras pikiran masyarakat. Farhana selaku Dekan Fakultas Hukum UIJ berpendapat, “UIJ menyikapi dengan penuh rasa syukur karena pilkada sudah selesai.” (Farhana, wawancara 18 September 2017). Hal ini menunjukkan bahwa proses Pilkada DKI memang menjadi pusat perhatian nasional, terutama konflik opini yang bertransformasi menjadi gelombang aksi berjilid di Jakarta. Farhana menambahkan bahwa, “Peran UIJ membina mahasiswa dalam menjadi warga negara yang baik sesuai Pancasila. Memberi pemahaman pada mahasiswa tidak bisa dipisahkan dalam memahamai dan menghayatinya. Setiap sila berkaitan satu sama lain. Sila pertama yang menjadi titik sentral bagi sila selanjutnya. Diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa selalau ditanamkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila.” (Farhana, wawancara 18 September 2017).

Kurikulum UIJ sebagai kampus berbasis Islam memberikan titik tekan pada nilai-nilai keislaman yang universal. Maka siapa saja mahasiswa yang beragama di luar Islam boleh menjadi mahasiswa UIJ dengan tetap memandang bahwa di UIJ adalah tempat membina ilmu. Artinya semua mahasiswa baik muslim maupun nonmuslim mendapatkan matakuliah *dirasat islamiyah*. Menurut Farhana, “UIJ mempunyai mata kuliah *Dirasat Islamiyah* yang diajarkan selama 4 semester dalam mendidik mahasiswa untuk memiliki budi Islam yang cakap di masyarakat. Mahasiswa harus punya prinsip dalam menjalankan *muamalah*. Visi UIJ menekankan pada intelektual dan akal budi menjadi prioritas. Seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama, tidak didikotomi.” (Farhana, wawancara 18 September 2017).

Secara spesifik, kearifan agama yang ditanamkan di UIJ adalah penguatan nilai-nilai Islam yang terintegratif dengan semua cabang keilmuan. Melalui *dirasat islamiyah* UIJ membina mahasiswa agar terbiasa beraktivitas di masyarakat sesuai budi luhur dari nilai-nilai Islam. kearifan agama diintegrasikan dengan kearifan akademik yang menjadikan mahasiswa membawa nilai-nilai Islam sebagai akademisi atau praktisi ketika lulus nanti. Adapun perannya dalam pembangunan perdamaian, bahwa nilai-nilai Islam yang diajarkan selama 4 semester ini menjadikan para mahasiswa maupun lulusan UIJ menjadi pribadi islami yang dapat memberikan keteduhan di tengah masyarakat yang berkonflik khususnya pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Perdamaian

Faktor-faktor yang berpengaruh pada peran perguruan tinggi agama dalam membangun perdamaian dan mengimplementasikan pendidikan Pancasila adalah, diantaranya; *Pertama*, Identitas Sosial. Menguatnya Identitas sosial di masyarakat menjadi faktor penghambat pembangunan perdamaian. identitas sosial yang menyeruak menjadi politik identitas juga tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila jika sudah dijadikan alat untuk mendiskriminasi kelompok lain. Yang pada akhirnya saling menuduh satu sama lain dengan tuduhan yang menjurus pada konflik verbal, diantaranya kafir, munafik, sesat, cina, radikal, anti-Pancasila, intoleran dan makian lainnya selama pilkada DKI berlangsung. Tuduhan-tuduhan tersebut menjadi suatu dikotomi antara kelompok pendukung pasangan calon. Satu kelompok mengaku paling beragama, dan kelompok lainnya mengaku paling nasionalis. Klaim-klaim seperti ini yang meruncingkan situasi konflik di DKI Jakarta.

Kedua, Sistem Deteksi dan Respons dini terhadap konflik juga berpengaruh pada pembangunan perdamaian. masing-masing perguruan tinggi memiliki sistem yang berbeda, misalnya di UIN Jakarta deteksi dan respons dini dilakukan melalui pelarangan organisasi ekstra kampus beraktivitas di dalam kampus. Juga melalui komunikasi ke berbagai komunitas, diantaranya masyarakat sekitar, para alumni, dan pemerintah serta aparat setempat untuk bersama mengawasi kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kampus. Kemudian di UMJ dilakukan pencegahan untuk mengikuti aksi-aksi yang menjurus pada politisasi dan konflik sosial melalui Wakil Dekan dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Adapaun di UIJ melalui pembinaan yang dilakukan dengan mengadakan program seminar dan workshop agar mahasiswa disibukkan dengan kegiatan di dalam kampus daripada harus mengikuti aksi-aksi yang berpotensi pada konflik. Di UNUSIA/STAINU masih kental dengan budaya santri, mahasiswa diharuskan untuk mengaji di kampus dengan konsep pesantren tersebut. Demikianlah masing-masing perguruan tinggi agama memiliki cara berbeda dalam deteksi dan respons dini terhadap konflik.

Ketiga, Pemberdayaan Masyarakat. Perguruan tinggi memiliki program pengabdian masyarakat sesuai dengan tridarma perguruan tinggi. Melalui program ini setiap perguruan tinggi mampu memberdayakan masyarakat untuk tidak larut dalam konflik sosial dan cara pencegahan dan penanggulangannya. UIN Jakarta menggunakan program *community outreach* untuk memberdayakan potensi besar dari masyarakat untuk bersama membangun perdamaian. melalui desa mitra, UIN Jakarta mendampingi warga untuk dapat mengambil peran sebagai juru damai di tempatnya masing-masing. Begitu juga di UMJ, UNUSIA, dan UIJ dapat memberdayakan masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang memberikan penyuluhan pada warga untuk dapat membangun perdamaian di lingkungannya.

Keempat, Ketahanan Masyarakat (*community resilience*). Masyarakat Jakarta selama pilkada berlangsung dapat dipetakan dalam bagian-bagian masyarakat rentan dan masyarakat tangguh. Masyarakat rentan adalah generasi muda yang mudah terprovokasi isu-isu yang bermuatan SARA sebagai akibat dari konflik sosial yang terjadi. Kemudian kelompok tangguh yang terdiri atas akademisi, ilmuwan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu memberikan penyuluhan pada kelompok rentan agar terhindar dari perpecahan yang diakibatkan oleh kontestasi politik. Media sosial yang menjadi faktor dominan penyebaran berita-berita bohong, fitnah, dan provokasi itu disebarkan. Bahkan lebih buruk lagi berita bohong dan provokasi itu diproduksi oleh suatu korporasi yang khusus menyebarkannya di media sosial seperti kasus Saracen. Maka dibutuhkan kerjasama untuk membangun perdamaian melalui ketahanan masyarakat dari permainan isu-isu SARA.

Kelima, Pancasila sebagai Resolusi Konflik. Pancasila harus digalakkan kembali. Regulasi yg ada harus menunjukkan semangat nilai-nilai Pancasila khususnya di Jakarta. Tingkat pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu harus diiringi dengan tradisi literasi. Tokoh-tokoh agama menanamkan nilai-nilai Pancasila secara benar. Terutama pada isu kesejahteraan dan keadilan sosial, tidak hanya aspek ketuhanan saja, akan tetapi bagaimana menghadapi kesenjangan dan akses kesehatan, pendidikan dan lainnya. Pada masyarakat modern orang tidak lagi mempersoalkan isu-isu agama, karena sudah selesai dengan itu semua, Halimah Yaqub menjadi presiden Singapura dari kalangan muslim menunjukkan negara tetangga lebih dewasa dalam berpolitik. Masyarakat harus ditingkatkan pemahamannya pada Pancasila. Karena 20 tahun ini orang relatif melupakan. Semua elemen pemerintah maupun perguruan tinggi harus mencari formulasi untuk menekankan aktualisasi Pancasila. Ketauladanan pemimpin dan dosen mengedepankan nilai-nilai toleransi. Pancasila tidak sekedar mantra. Akan tetapi terinternalisasi pada jiwa masyarakat.

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta telah selesai, namun, masih terdapat masyarakat yang terbelah akibat perbedaan pilihan pada pilkada. Perpecahan dan konflik opini yang terjadi di tengah masyarakat adalah bagian dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Kedewasaan berpolitik sangat dibutuhkan ketika kontestasi mulai memanas dan menjurus pada penguatan identitas sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, Zafrullah Salim selaku Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), berpendapat bahwa “umat Islam perlu ditingkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang Islam agar tidak terjebak pada konflik perpecahan sesama umat Islam dan tersulut untuk saling menuduh dan melakukan tindakan diskriminatif.” Zafrullah Salim juga berpendapat bahwa “dalam Islam terjadi proses *tauliyah* atau memberi wewenang pada orang lain dalam hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik bersifat primordial maupun publik secara luas. Maka proses mentauliyahkan itu butuh kesadaran yang tinggi dari kalangan umat Islam. Surat Al-Maidah 51 untuk semua konteks kehidupan sehari-hari. Bahwa kita harus siap menerima peralihan kewenangan. *Khilafah* itu bukan hanya konsep islam, tapi semua umat manusia.” (Zafrullah Salim, wawancara 20 September 2017).

Proses membangun perdamaian di Indonesia menurut Marsudi Syuhud harus memiliki 4 sikap, yaitu; *Pertama*, dijadikan *Ibrah*. Kekerasan yang terjadi adalah bagian dari warisan manusia (*human heritages*). Misalnya dicontohkan pemberontakan oleh PKI untuk dijadikan pendidikan/pelajaran. Manusia harus meliha t kejadian demi kejadian sebagai *ibroh*. Qobil dan Habil akar dari *violent*, semua tujuannya untuk pendidikan. *Kedua*, Sabar dan Waspada (*asshobiru warobitu*). Sabar adalah kunci untuk

membangun perdamaian dan meresolusi konflik. Sabar dalam pandangan Marsudi Syuhud dibagi menjadi 3, yaitu; 1) *ashabru ala thooah* adalah ikhlas untuk tunduk pada peraturan yang disepakati oleh manusia karena untuk mengatur manusia. Syariah itu untuk mengatur manusia. Begitu juga aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan manusia. 2) *ashobru alal maasih* adalah menahan diri dari maksiat. Kontra atau melanggar hukum adalah maksiat. 3) *ashobru alal bala* adalah jika sudah terjadi seperti kejadian pembunuhan adalah bala. Artinya sabar tapi jangan diulangi. Penyelesaiannya tidak memakai senjata, tetapi dengan pendidikan yang prosesnya panjang tersebut.

Ketiga, Sabar dan Memaafkan (*shabara wa ghafara*). *Ghafara* atau memberi maaf adalah resolusi konflik. Semua pihak harus saling memaafkan. Baik yang melakukan kekerasan, maupun korban dari kekerasan tersebut. Saling memaafkan adalah tindakan mulia manusia untuk membangun keberlangsungan hidup yang harmonis dan penuh perdamaian. Maka ketika terjadi konflik, maka semua harus kembali bersatu dan berdamai dengan cara saling memaafkan. Kembali lagi pada narasi awal, bahwa konflik itu terjadi secara alamiah dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan manusia. Kemudian jika kebutuhan itu tidak terpenuhi langkah kekerasan menjadi salah satu yang paling banyak digunakan oleh manusia. Karena sifat dasar manusia memang kekerasan. *Keempat*, Ketertiban atau keteraturan (*Tartib*). Setelah melalui sikap yang tiga sebelumnya, selanjutnya adalah menjaga keteraturan dan ketertiban di masyarakat. Cipta damai harus senantiasa dijunjung tinggi sebagai perjuangan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang damai secara positif.

Kondisi damai dibagi menjadi dua, (Galtung, 2007) yaitu damai negatif (*negative peace*) dan damai positif (*positive peace*). Damai negatif adalah situasi di mana tidak ada perang. Damai positif adalah situasi ketika tidak ada kekerasan, (baik kekerasan langsung, kekerasan struktural, maupun kekerasan kultural). Indonesia jika dikategorikan dalam dua definisi damai menurut Johan Galtung termasuk pada kondisi damai negatif. Kekerasan masih terjadi di beberapa tempat. Hal ini diakibatkan oleh tidak meratanya distribusi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Peran perguruan tinggi agama dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai Mata Kuliah Umum (MKU) wajib di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila diajarkan untuk membina mahasiswa agar dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perguruan tinggi yang masuk dalam penelitian memiliki peran yang berbeda. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui kearifan akademiknya mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu Pancasila dan Kewiraan menjadi kearifan akademik Keislaman-keindonesiaan. Di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) melalui 2 fundamental menanamkan pendidikan Pancasila melalui doktrin bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang sudah final, sebagai *way of life*, dan Indonesia adalah negara kesepakatan. Kemudian fundamen yang kedua adalah Kemuhammadiyah sebagai ideologi masyarakat. Hal itu menjadi rumusan dalam 4 darma UMJ yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Kemudian Universitas NU Indonesia (UNUSIA/STAINU) menempatkan Pendidikan Pancasila untuk membangun *akhlaqul karimah* dan Pancasila sebagai ijtihad para ulama yang harus menjadi spirit jihad bagi generasi penerus untuk mempertahankan NKRI. Adapun Universitas Islam Jakarta (UIJ) memiliki kearifan

akademik dalam implementasi Pendidikan Pancasila sebagai integrasi dari semua mata kuliah yang diajarkan, UIJ memiliki mekanisme integrasi, yaitu setiap rumpun ilmu itu harus sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai Islam. Di kampus UIJ mahasiswa dikenalkan mata kuliah *dirasat islamiyah* selama 4 semester untuk menanamkan jiwa keislaman yang berkarakter Pancasila.

Adapun Faktor-faktor yang berpengaruh pada peran perguruan tinggi agama dalam membangun perdamaian dan mengimplementasikan pendidikan Pancasila adalah, diantaranya; *Pertama*, Identitas Sosial. Menguatnya Identitas sosial di masyarakat menjadi faktor penghambat pembangunan perdamaian. *Kedua*, Sistem Deteksi dan Respons dini terhadap konflik juga berpengaruh pada pembangunan perdamaian. masing-masing perguruan tinggi memiliki sistem yang berbeda, misalnya di UIN Jakarta deteksi dan respons dini dilakukan melalui pelarangan organisasi ekstra kampus beraktivitas di dalam kampus. Juga melalui komunikasi ke berbagai komunitas, diantaranya masyarakat sekitar, para alumni, dan pemerintah serta aparat setempat untuk bersama mengawasi kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kampus. Kemudian di UMJ dilakukan pencegahan untuk mengikuti aksi-aksi yang menjurus pada politisasi dan konflik sosial melalui Wakil Dekan dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Adapun di UIJ melalui pembinaan yang dilakukan dengan mengadakan program seminar dan workshop agar mahasiswa disibukkan dengan kegiatan di dalam kampus daripada harus mengikuti aksi-aksi yang berpotensi pada konflik. Di UNUSIA/STAINU masih kental dengan budaya santri, mahasiswa diharuskan untuk mengaji di kampus dengan konsep pesantren tersebut. Demikianlah masing-masing perguruan tinggi agama memiliki cara berbeda dalam deteksi dan respons dini terhadap konflik.

Ketiga, Pancasila sebagai Resolusi Konflik. Pancasila harus digalakkan kembali. Regulasi yg ada harus menunjukkan semangat nilai-nilai Pancasila khususnya di Jakarta. Tingkat pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu harus diiringi dengan tradisi literasi. Tokoh-tokoh agama menanamkan nilai-nilai Pancasila secara benar. Terutama pada isu kesejahteraan dan keadilan sosial, tidak hanya aspek ketuhanan saja, akan tetapi bagaimana menghadapi kesenjangan dan akses kesehatan, pendidikan dan lainnya. Pada masyarakat modern orang tidak lagi mempersoalkan isu-isu agama, karena sudah selesai dengan itu semua, Halimah Yaqub menjadi presiden Singapura dari kalangan muslim menunjukkan negara tetangga lebih dewasa dalam berpolitik. Masyarakat harus ditingkatkan pemahamannya pada Pancasila. Karena 20 tahun ini orang relatif melupakan. Semua elemen pemerintah maupun perguruan tinggi harus mencari formulasi untuk menekankan aktualisasi Pancasila. Ketauladanan pemimpin dan dosen mengedepankan nilai-nilai toleransi. Pancasila tidak sekedar mantra. Akan tetapi terinternalisasi pada jiwa masyarakat.

Referensi

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality, and behavior (2nd Ed.)*. Milton-Keynes, England: Open University Press/McGraw- Hill.
- Albarracin, D., Blair, T. J. & Zanna, M. P. (2005). The handbook of attitudes. Dalam Ajzen, I. & Fishbein, M., *The Influence of attitudes on behavior*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

- Ami C. Carpenter. 2014. *Community Resilience to Sectarian Violence in Baghdad*. New York : Springer
- Anasarias, E., & Berliner, P. (2009). *Human Rights and Peacebuilding*. In J. Rivera, *Handbook on Building Cultures of Peace* (pp. 181-196). New York: Springer.
- Azra, Azyumardi. (2015). *Civic Education at Public Islamic Higher Education* (Tarbiya: *Journal of Education in Muslim Society* Vol.2). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* (Edisi 2). Jakarta : Pustaka Pelajar
- Bagus Prihantoro Nugroho, Ini Data 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten di Pilkada 2017, online, 13 Februari 2017, 15.00. <https://news.detik.com/berita/d-3421244/ini-data-7-provinsi-18-kota-dan-76-kabupaten-di-pilkada-2017>
- Bandoro, Bantarto. (2005). *Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta: CSIS
- Brown, C. (2006). *Social psychology*. London: Sage Publications.
- Buckland, P. (2005). *Reshaping the Future: Education and Post-Conflict Reconstruction*. Washington D.C: The World Bank.
- Christie, Daniel J, dkk. (2001). *Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 21st Century*. New Jersey: Prentise Hall.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Galtung, Johan. 1960. *Three Approach to peace : Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding dalam Peace, War and Defense, Peace Research* Vol.1960,
- Gandhi, M.K. 1948. *Non-violence in Peace and War* (Vol. 1 & 2). Ahmedabad: Navajivan Publishing House.
- Hagger, M., & Chatzisarantis, N. 2005. *Social psychology of exercise and sport*. Berkshire: Open University Press.
- Jeong, Ho-Won. (2008). *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London : Sage Publication.
- Johnson, L. S. (2007). *Moving from Piecemeal to Systemic Approaches to Peace Education in Divided Societies: Comparative Efforts in Northern Ireland and Cyprus*. In Z. Bekerman, & C. McGlynn, *Addressing Ethnic Conflict Through Peace Education* (pp. 21-34). New York: Palgrave Macmillan
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media.
- KPU, Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua, online, 5 Mei 2017, 22:20 WIB <https://pilkada2017.kpu.go.id/>
- Leahy, Louis. 1991. *Esai Filsafat untuk Masa Kini: Telaah Masalah Roh-Materi Berdasarkan Data Empiris Baru*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, D.C.: United States Institute of Peace.
- Malik, Ichsan. (2014). *Strategi Pencegahan Konflik: Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik*. Belum dipublikasikan.
- Mohamad, Goenawan. (2002). *Eksotopi : Tentang Kekuasaan, Tubuh, dan Identitas*. Jakarta: Grafiti.
- Moleong, L.J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam: Telaah atas Kerangka Konseptual Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nata, Abuddin. (2004). *Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang* (Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Vol.2). Jakarta: Departemen Agama
- Navarro-Castro, L., & Nario-Galace, J. (2010). *Peace Education: a Pathway to a Culture of Peace (2nd Edition ed.)*. Quezon City, The Philippines: Center for Peace Education Miriam College.
- Noor, J. (2016). *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nurcholish, Ahmad. (2015). *Peace Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nurdin, Syafruddin dan Usman Basyiruddin. (2003). *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.
- Panggabean, S. R. (2006). *Educating to Handle Conflict and Avoid Violence*. In C. A. Coppel, *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution* (pp. 217-228). London: Routledge
- Pruitt, Dean G. (1993). *Negotiation in Social Conflict*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Rivera, Joseph de. (2009). *Handbook on Building Cultures of Peace*. New York: Springer
- Rosyada, Dede. (2004). *Pola Pengembangan Kurikulum dalam Model Sekolah Demokrasi* (Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan vol 2). Jakarta: Departemen Agama
- Satha-Anand, Chaiwat. (2002). *Agama dan Budaya Perdamaian*. Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama.
- Sidi, Indra Djati. (2004). *Nilai Stategis Pendidikan Agama dalam Pembentukan Bangsa* (Religiusitas: Jurnal Transformasi, Kependidikan, dan Keagamaan, Vol.1). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Smith, William A. (2008). *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solomon, G. (2009). *Peace Education: Its Nature, Nurture, and the Challenges It Faces*. In J. d. Rivera, *Handbook on Building Culture of Peace* (pp. 107-122). New York : Springer.

- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tippe, Syarifudin. (2016). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: Salaemba Humanika.
- Ubaedillah, A. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan : Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Webel, Charles & Johan Galtung. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.